



**RENCANA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2018**



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 56 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 18 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan Sumber Daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan Sumber Daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

## BAB II RENCANA KERJA

### Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

### Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I      Pendahuluan
  - BAB II     Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
  - BAB III    Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
  - BAB IV     Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
  - BAB V     Penutup
- (3) Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Desember 2018



Diundangkan di Kapanjen  
Pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**



**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2018 Nomor 38 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR       TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS TENAGA  
KERJA       KABUPATEN       MALANG  
TAHUN 2019

**RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MALANGTAHUN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan Rencana Kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019. Sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

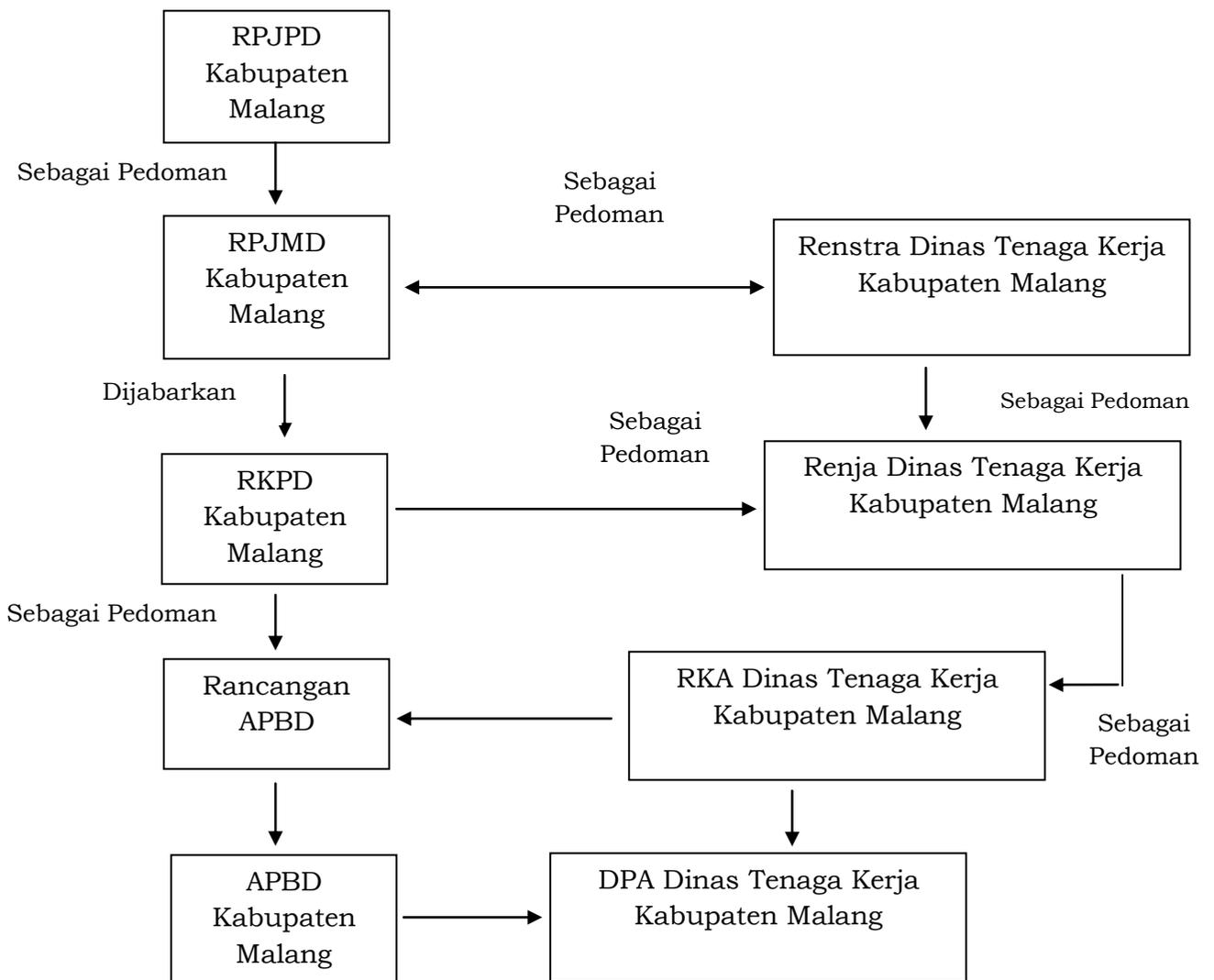
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seluruh dokumen Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 tersebut digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja berpedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat.

**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Dinas Tenaga Kerja berperan dalam mendukung Misi ke-5 Bupati Malang yaitu “Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pengembangan produk unggulan desa”.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang selama Tahun 2019.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang adalah:

1. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan dengan sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja;
2. Memperlancar tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Malang di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V PENUTUP**

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan nasional maupun daerah adalah ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi pencari kerja sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehingga bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan sebagian besar pencari kerja di Indonesia pada umumnya. Kurangnya kualitas yang dimiliki oleh para pencari kerja disebabkan oleh pembangunan di desa kurang optimal. Terkait dengan hal tersebut, sesuai misi ke-5 Pemerintah Kabupaten Malang, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja adalah :

“Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa”

Dinas Tenaga Kerja melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah termasuk pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja**

Penetapan tujuan sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan tujuan tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kinerja untuk mendukung visi misi Bupati terpilih. Berdasarkan arahan arti dan makna tujuan organisasi dimaksud, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan misinya, menetapkan tujuan untuk kurun waktu 2016-2021 sebagai berikut :

1. Menurunkan jumlah pengangguran di desa
2. Menyerap tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja
3. Penempatan calon transmigran.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam mengemban misi organisasi untuk kurun waktu 2016-2021 adalah

menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Malang dengan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi kebijakan organisasi dan menjabarkan secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, maka untuk menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam program kerja dan kegiatan sebagai berikut:

1. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*, dengan kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
  - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
  - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ;
  - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
  - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
  - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
  - h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
  - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
  - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah ;
  - k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*, dengan kegiatan:
  - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
3. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*, dengan kegiatan :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD ;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ;
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

5. *Program Perluasan dan Kesempatan Kerja*, dengan kegiatan :
  - a. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja;
6. *Program Pembinaan Lingkungan Sosial*, dengan kegiatan :
  - a. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan Padat Karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi ;
  - b. Pelayanan Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja ;
  - c. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.
7. *Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja*, dengan kegiatan :
  - a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
  - b. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
8. *Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*, dengan kegiatan :
  - a. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.
9. *Program Ketrasmigrasian* dengan kegiatan :
  - a. Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan ;
  - b. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM ;
  - c. Penyuluhan Transmigrasi Lokal ;
  - d. Pelatihan Transmigrasi Lokal.

Secara lengkap, penjelasan mengenai program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang yang akan dilaksanakan disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020		Ket
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>989,213,178</b>			<b>100%</b>	<b>1.058.458.101</b>	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas Tenaga Kerja	7500 Surat	279,959,420	APBD Kabupaten		7500 Surat	299.556.580	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	24,729,840	APBD Kabupaten		12 Bulan	26.460.929	
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	101,209,160	APBD Kabupaten		12 Bulan	108.293.801	
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku	Dinas Tenaga Kerja	49 Unit	20,024,301	APBD Kabupaten		49 Unit	21.426.002	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020		Ket
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		cadang yang disediakan (Unit)								
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Dinas Tenaga Kerja	15 Item	53,025,471	APBD Kabupaten		15 Item	56.737.254	
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Dinas Tenaga Kerja	68 Buah	3,343,108	APBD Kabupaten		68 Buah	3.577.126	
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	Dinas Tenaga Kerja	9 Unit	120,786,950	APBD Kabupaten		9 Unit	129.242.037	
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	108,536,520	APBD Kabupaten		12 Bulan	116.134.076	
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	100,379,108	APBD Kabupaten		12 Bulan	107.405.645	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020		Ket
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah	ke luar daerah (HOK)								
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	130,083,538	APBD Kabupaten		12 Bulan	139.189.386	
	11. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	47,135,762	APBD Kabupaten		12 Bulan	50.435.265	
	<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>51,346,475</b>			<b>100%</b>	<b>54.940.728</b>	
	12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Dinas Tenaga Kerja	1 Unit	30,463,499	APBD Kabupaten		1 Unit	32.595.944	
	13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan roda empat dan	Dinas Tenaga Kerja	8 Unit	20,882,976	APBD Kabupaten		8 Unit	22.344.784	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020		Ket
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas/Operasional	kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)								
	<b>III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>3,434,700</b>			<b>100%</b>	<b>3.675.129</b>	
	14. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Dinas Tenaga Kerja	3 Orang	3,434,700	APBD Kabupaten		3 Orang	3.675.129	
	<b>IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>7,628,240</b>			<b>100%</b>	<b>8.162.217</b>	
	15. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	Dinas Tenaga Kerja	1 Buku	5,306,612	APBD Kabupaten		1 Buku	5.678.074	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020		Ket
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)								
	16. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Dinas Tenaga Kerja	2 Buku	1,398,839	APBD Kabupaten		2 Buku	1.496.758	
	17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (Buku)	Dinas Tenaga Kerja	1 Buku	922,789	APBD Kabupaten		1 Buku	987.385	
	<b>V. Program Perluasan dan Penempatan Kerja</b>	<b>Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)</b>		<b>100%</b>	<b>268,831,500</b>			<b>100%</b>	<b>287.650.000</b>	
	18. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan	Salah satu Hotel di Kabupaten Malang	100%	268,831,500	APBD Kabupaten	PUG	100%	287.650.000	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020		Ket
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		lembaga penyalur tenaga kerja								
	19. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan penyebaran informasi bursa tenaga kerja bagi masyarakat	Stadion Kanjuruhan dan SMK-SMK di Kabupaten Malang	0%	-	APBD Kabupaten		0%	0	
	20. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	Dinas Tenaga Kerja	0 Orang	-	APBD Kabupaten		0 Orang	0	
	<b>VI. Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Persentase Pembinaan Lingkungan</b>		<b>100%</b>	<b>3,083,166,000</b>			<b>100%</b>	<b>3.224.087.000</b>	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020		Ket
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Sosial</b>								
	21. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	Kec. Singosari, Jabung dan Pagelaran	264 Orang	1,070,000,000	DBHCHT	PUG	264 Orang	1.070.000.000	
	22. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Stadion Kanjuruhan dan SMK-SMK di Kab. Malang	500 Orang	308,208,000	DBHCHT	PUG	500 Orang	329.782.000	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020		Ket
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	Kecamatan di Kabupaten Malang	340 Orang	1,704,958,000	DBHCHT	PUG	340 Orang	1.824.305.000	
	<b>VII. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja</b>	<b>Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)</b>		<b>100%</b>	<b>1,137,003,800</b>			<b>100%</b>	<b>1.216.594.500</b>	
	24. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	Kecamatan Singosari, Lawang, Kapanjen, Wagir, Salah satu hotel di Kabupaten Malang	1 Rekom	887,024,800	APBD Kabupaten	PUG	1 Rekom	949.116.500	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020		Ket
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase terlaksanannya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kecamatan Singosari, Lawang, Kepanjen, Wagir, Salahsatu hotel di Kabupaten Malang	100%	249,979,000	APBD Kabupaten		100%	267.478.000	
	<b>VIII. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase terlaksanannya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)</b>		<b>100%</b>	<b>734,594,000</b>			<b>100%</b>	<b>786.015.500</b>	
	26. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	BLKI Singosari, Kecamatan Pujon & Sumbermanjing Wetan	0 Orang	-	DBHCHT		0 Orang	0	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020		Ket
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	27. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	BLKI Singosari, salah satu hotel di Kabupaten Malang	40 Lembaga	101,096,000	APBD Kabupaten		40 Lembaga	108.172.500	
	28. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	BLKI Singosari, Kecamatan Pujon & Sumbermanjing Wetan	240 Orang	633,498,000	APBD Kabupaten	PUG	240 Orang	677.843.000	
	<b>IX. Program Ketrasmigrasian</b>	<b>Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi</b>		<b>100%</b>	<b>586,831,000</b>			<b>100%</b>	<b>627.908.500</b>	
	29. Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dengan Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	3 Lokasi	142,716,000	APBD Kabupaten		3 Lokasi	152.706.500	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020		Ket
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Pemda Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan	5 KK	196,282,000	APBD Kabupaten		5 KK	210.021.000	
	31. Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	Kecamatan Pojun, Sumbermanjing Wetan	560 Orang	137,674,000	APBD Kabupaten		560 Orang	147.311.000	
	32. Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	Kecamatan Pojun, Kecamatan Sumbermanjing Wetan	15 Orang	110,159,000	APBD Kabupaten	PUG	15 Orang	117.870.000	
	<b>T O T A L</b>				<b>6,862,048,893</b>				<b>7.267.491.675</b>	

#### Keterangan

#### Program Lingkungan Sosial

- Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi akan diadakan perubahan nama kegiatan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil yaitu menjadi Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat akan diadakan perubahan nama kegiatan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil yaitu menjadi Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 yang diatur Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018, Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja yang terdiri dari program dan kegiatan serta sumber pendanaan sesuai dengan pagu anggaran total Rp. 9.741.029.623,88 Belanja Tidak Langsung Rp. 3.562.146.730,88 dan Belanja Langsung Rp. 6.178.882.893,00 disajikan sebagai berikut :

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>989,213,178</b>		
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas Tenaga Kerja	7500 Surat	279,959,420	APBD Kabupaten	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	24,729,840	APBD Kabupaten	
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	101,209,160	APBD Kabupaten	
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang	Dinas Tenaga Kerja	49 Unit	20,024,301	APBD Kabupaten	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
		yang disediakan (Unit)					
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Dinas Tenaga Kerja	15 Item	53,025,471	APBD Kabupaten	
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Dinas Tenaga Kerja	68 Buah	3,343,108	APBD Kabupaten	
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	Dinas Tenaga Kerja	9 Unit	120,786,950	APBD Kabupaten	
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	108,536,520	APBD Kabupaten	
	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	100,379,108	APBD Kabupaten	
	10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	130,083,538	APBD Kabupaten	
	11. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	47,135,762	APBD Kabupaten	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>51,346,475</b>		
	12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Dinas Tenaga Kerja	1 Unit	30,463,499	APBD Kabupaten	
	13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Dinas Tenaga Kerja	8 Unit	20,882,976	APBD Kabupaten	
	<b>III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>3,434,700</b>		
	14. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Dinas Tenaga Kerja	3 Orang	3,434,700	APBD Kabupaten	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>7,628,240</b>		
	15. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Dinas Tenaga Kerja	1 Buku	5,306,612	APBD Kabupaten	
	16. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Dinas Tenaga Kerja	2 Buku	1,398,839	APBD Kabupaten	
	17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Dinas Tenaga Kerja	1 Buku	922,789	APBD Kabupaten	
	<b>V. Program Perluasan dan Penempatan Kerja</b>	<b>Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)</b>		<b>100%</b>	<b>268,831,500</b>		
	18. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Salah satu Hotel di Kabupaten Malang	100%	268,831,500	APBD Kabupaten	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	19. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan penyebaran informasi bursa tenaga kerja bagi masyarakat	Stadion Kanjuruhan dan SMK-SMK di Kabupaten Malang	0%	-	APBD Kabupaten	
	20. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	Dinas Tenaga Kerja	0 Orang	-	APBD Kabupaten	
	<b>VI. Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial</b>		<b>100%</b>	<b>3,083,166,000</b>		
	21. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	Kec. Singosari, Jabung dan Pagelaran	264 Orang	1,070,000,000	DBHCHT	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	22. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Stadion Kanjuruhan dan SMK-SMK di Kab. Malang	500 Orang	308,208,000	DBHCHT	PUG
	23. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	Kecamatan di Kabupaten Malang	340 Orang	1,704,958,000	DBHCHT	PUG
	<b>VII. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja</b>	<b>Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)</b>		<b>100%</b>	<b>1,137,003,800</b>		
	24. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	Kecamatan Singosari, Lawang, Kepanjen, Wagir, Salah satu hotel di Kabupaten Malang	1 Rekom	887,024,800	APBD Kabupaten	PUG
	25. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kecamatan Singosari, Lawang, Kepanjen, Wagir, Salahsatu hotel di Kabupaten Malang	100%	249,979,000	APBD Kabupaten	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>VIII. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)</b>		<b>100%</b>	<b>734,594,000</b>		
	26. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	BLKI Singosari, Kecamatan Pujon & Sumbermanjing Wetan	0 Orang	-	DBHCHT	
	27. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	BLKI Singosari, salah satu hotel di Kabupaten Malang	40 Lembaga	101,096,000	APBD Kabupaten	
	28. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	BLKI Singosari, Kecamatan Pujon & Sumbermanjing Wetan	240 Orang	633,498,000	APBD Kabupaten	PUG

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019				CAT. PENTING
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>IX. Program Ketransmigrasian</b>	<b>Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi</b>		<b>100%</b>	<b>586,831,000</b>		
	29. Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dengan Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	3 Lokasi	142,716,000	APBD Kabupaten	
	30. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Pemda Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan	5 KK	196,282,000	APBD Kabupaten	
	31. Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	Kecamatan Pojun, Sumbermanjing Wetan	560 Orang	137,674,000	APBD Kabupaten	
	32. Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	Kecamatan Pojun, Kecamatan Sumbermanjing Wetan	15 Orang	110,159,000	APBD Kabupaten	PUG
	<b>TOTAL</b>				<b>6,862,048,893</b>		

## **Keterangan**

### **Program Lingkungan Sosial**

- Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi akan diadakan perubahan nama kegiatan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil yaitu menjadi Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat akan diadakan perubahan nama kegiatan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil yaitu menjadi Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA**  
**TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 9 program dan 29 kegiatan. Tingkat capaian target kinerja program kegiatan tahun 2016 dapat terealisasi rata-rata 99,99%.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja memiliki Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Transmigrasi, berikut program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Perluasan dan Penempatan Kerja
6. Program Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
9. Program Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi Lokal

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2018 dan Capaian Renstra tersaji dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja s/d Tahun 2018**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (akhir periode renstra Disnaker)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (=7+9)	11 (10/4)
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	22500 buah	5055 Surat	7500 surat	6682 Surat	89.09%	7500 buah	14182 buah	63,03%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Bulan	4 rekening	4 rekening	4 rekening	100%	12 Bulan	12 Bulan	33% *
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	66,67%
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	147 Unit	53 Unit	49 unit	49 unit	100%	49 Unit	98 Unit	66,67%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	45 Item	14 Item	15 item	15 item	100%	15 Item	30 Item	66,67%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	204 Buah	40 Buah	68 buah	68 buah	100%	68 Buah	136 Buah	66,67%
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	27 Unit	7 Unit	9 unit	9 unit	100%	9 Unit	18 Unit	66,67%



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (akhir periode renstra Disnaker)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (=7+9)	11 (10/4)
	<b>Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>								
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	3 Buku	1 Buku	1 buku	1 buku	100%	1 Buku	1 Buku	33%
17	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	6 Buku	2 Buku	2 buku	2 buku	100%	2 Buku	2 Buku	33%
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 Buku	1 Buku	1 buku	1 buku	100%	1 Buku	1 Buku	33%
<b>V</b>	<b>Program Perluasan dan Penempatan Kerja</b>	<b>Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
19	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan penyebaran informasi bursa tenaga kerja bagi masyarakat	-	330 Orang	400 orang	400 orang	100%	-	-	-
20	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	100%	100 Orang	100 orang	100 orang	100%	100%	100%	100%
<b>VI</b>	<b>Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja</b>	<b>Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
21	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	1 Rekom	1 Rekom	1 rekom	1 rekom	100%	1 Rekom	1 Rekom	100%
22	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian	120 Lembaga	50 Orang	50 orang	50 orang	100%	40 Lembaga	40 Lembaga	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (akhir periode renstra Disnaker)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (=7+9)	11 (10/4)
	Industrial	Perselisihan Hubungan Industrial								
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)</b>	720 Orang					240 Orang	<b>100%</b>	<b>100%</b>
23	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	<b>100%</b>	216 Orang	380 orang	380 orang	100%	<b>100%</b>	-	-
24	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja			40 orang	-	-		-	- *)
25	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	100%	-	240 orang	240 orang	100%	100%	490 Orang	68,05%
<b>VIII</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>100%</b>	-				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100% *)</b>
26	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	264 Orang					264 Orang	264 Orang	100% *)
27	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	500 Orang					500 Orang	500 Orang	100% *)
28	Pembinaan Kemampuan	Jumlah orang yang	340 Orang					340 Orang	340 Orang	100% *)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (akhir periode renstra Disnaker)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (=7+9)	11 (10/4)
	dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja								
<b>IX</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi Lokal</b>	<b>Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
29	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dengan Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	100%	3 Lokasi	3 Lokasi	100%
30	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	5 KK	15 KK	15 KK	3 KK	20%	5 KK	5 KK	100%
31	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	560 Orang	280 Orang	560 orang	560 orang	100%	560 Orang	560 Orang	100%
32	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	15 Orang	65 Orang	15 orang	15 orang	100%	15 Orang	15 Orang	100%

**Keterangan Tabel 2.1 :****1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada tahun 2016 sampai tahun 2017 di hitung berdasarkan jumlah rekening yang dibayar setiap bulan sedangkan tahun 2018 sudah menggunakan indikator baru yaitu bulan.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 indikatornya berdasarkan exemplar. Sedangkan untuk tahun 2018 sudah menggunakan indikator baru yaitu bulan sehingga tidak dapat di ukur realisasi kinerjanya.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pada tahun 2016 – 2017 masih menggunakan indikator lama yaitu orang akan tetapi pada tahun 2018 menggunakan indikator bulan. Sehingga realisasi capaian 2018 indikator kinerjanya tidak dapat ukur.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah pada tahun 2016 – 2017 masih menggunakan indikator lama yaitu orang akan tetapi pada tahun 2018 menggunakan indikator bulan. Sehingga realisasi capaian 2018 indikator kinerjanya tidak dapat ukur.

**2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tidak tercantum pada renstra dan renja 2018 tetapi muncul pada dokumen DPA 2018.

**3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial**

- Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi pada Dinas Tenaga Kerja mendapat dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau sehingga untuk tahun 2017 tidak dapat diukur kinerjanya karena baru ada di tahun 2018. Pada Kegiatan ini akan diadakan perubahan nama kegiatan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil yaitu menjadi Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Kegiatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja pada Dinas Tenaga Kerja mendapat

dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau tidak dapat diukur kinerjanya karena kegiatan baru ditahun 2018.

- Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau tidak dapat diukur kinerjanya karena baru ditahun 2018. Kegiatan ini akan diadakan perubahan nama kegiatan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil yaitu menjadi Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja**

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan. SPM ini diperuntukkan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang menjadi Pelayanan Dasar

1. Pelayanan Pelatihan Kerja
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Pelaksanaan untuk SPM Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja di tahun 2018 teralisasi menjadi program yaitu :

1. Program Perluasan dan Penempatan Kerja
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
4. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja yang berdasarkan Indikator SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) secara lengkap diuraikan pada table 2.2







No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyalur Tenaga Kerja											
	20. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	-	-	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	
	21. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi	-	-	264 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	264 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
	<b>VI. Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	22. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi	-	-	0 Orang	264 Orang	264 Orang	264 Orang	0 Orang	264 Orang	264 Orang	264 Orang	
	23. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	-	-	0 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	0 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	
	24. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	-	-	0 Orang	300 Orang	340 Orang	340 Orang	0 Orang	300 Orang	340 Orang	340 Orang	
	<b>VII. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	25. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	-	-	380 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	380 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
	26. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja	-	-	0 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	0 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	



### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja**

Setiap organisasi pada umumnya menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang biasanya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar kendali organisasi tetapi sangat mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Berdasarkan Analisis dan evaluasi atas kondisi dalam saat ini, permasalahan dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu :

- a. Rendahnya upah pekerja/buruh telah mendorong gejolak pekerja, PHK dan maraknya Pekerja Migran Indonesia illegal;
- b. Meningkatnya jumlah penganggur terbuka karena tambahan angkatan kerja baru, PHK dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
- c. Rendahnya kualitas dan daya saing pencari kerja untuk mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri;
- d. Rendahnya motivasi angkatan kerja untuk berwirausaha, karena keterbatasan modal usaha, dan kurangnya akses pasar.

Adanya permasalahan yang tersebut dikarenakan terdapat hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yaitu :

- a. Pelaksanaan program yang belum optimal;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana;
- c. Efektifitas komunikasi dan koordinasi antar bidang dan sub bidang belum berjalan dengan baik;
- d. Pelayanan sosial kepada masyarakat yang belum optimal.

Faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Kajian eksternal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di luar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang yang meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat).

#### 1. Ancaman (Threat)

- a. Rendahnya upah pekerja/buruh telah mendorong gejolak pekerja, PHK dan maraknya TKI illegal ;

- b. Meningkatnya jumlah penganggur terbuka karena tambahan angkatan kerja baru, PHK dan pemulangan TKI bermasalah ;
- c. Rendahnya kualitas dan daya saing pencari kerja untuk mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri ;
- d. Rendahnya motivasi angkatan kerja untuk berwirausaha, karena keterbatasan modal usaha, dan kurangnya akses pasar.

## 2. Peluang (Opportunity)

- a. Adanya kewenangan otonomi bidang ketenagakerjaan ;
- b. Kesempatan kerja di luar negeri terbuka luas ;
- c. Adanya kebutuhan pelatihan ketrampilan teknis dan manajerial pencari kerja untuk mengisi peluang kerja untuk mengisi peluang kerja pada dunia usaha dan masyarakat ;
- d. Tersedianya Lembaga Pelatihan (Pemerintah/Swasta) yang menyelenggarakan pelatihan kerja ;
- e. Terbukanya kerjasama antar dinas/instansi pusat dan daerah serta dengan provinsi lain di bidang ketenagakerjaan.

Dirumuskan beberapa isu strategis yang digunakan dalam merumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan. Perumusan isu-isu strategis pada dasarnya mencakup strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas angkatan kerja ;
- b. Pengurangan pengangguran ;
- c. Peningkatan SDM Calon Transmigran ;
- d. Peningkatan jenis kuantitas serta kualitas pelatihan ;
- e. Peningkatan jumlah penempatan ;
- f. Peningkatan jumlah pembentukan LKS Bipartit serta Tripartit ;
- g. Peningkatan Upah Minimum Kabupaten ;
- h. Peningkatan jumlah perusahaan yang membuat perjanjian kerja bersama serta peraturan perusahaan ;
- i. Peningkatan pemahaman terhadap undang-undang ketenagakerjaan ;
- j. Peningkatan SDM Aparatur ;
- k. Peningkatan sarana dan prasarana bekerja ;

1. Peningkatan ketersediaannya informasi ketenagakerjaan serta perencanaan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap RKPD Tahun 2019 secara rinci disajikan dalam tabel 2.4. Pada tabel tersebut disampaikan perbandingan antara rencana program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah, sebagai berikut :

Tabel 2.3

## Review terhadap RKPD tahun 2019 Kabupaten Malang

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp )	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>989.213.178</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>989.213.178</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	7500 Surat	279.959.420	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	7500 Surat	279.959.420
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	24.729.840	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	24.729.840
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	101.209.160	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	101.209.160

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp )	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	49 Unit	20.024.301	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	49 Unit	20.024.301
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 Item	53.025.471	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 Item	53.025.471
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	68 Buah	3.343.108	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	68 Buah	3.343.108
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	9 Unit	120.786.950	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	9 Unit	120.786.950
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	108.536.520	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 Bulan	108.536.520

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp )	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			yang disediakan (jenis)					Undangan yang disediakan (jenis)		
	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	12 Bulan	100.379.108	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	12 Bulan	100.379.108
	10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	12 Bulan	130.083.538	10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	12 Bulan	130.083.538
	11. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	47.135.762	11. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	47.135.762
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>51.346.475</b>	<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>51.346.475</b>
	12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	1 Unit	30.463.499	12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkal	1 Unit	30.463.499

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp )	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			( jenis)					a ( jenis)		
	13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	20.882.976	13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	20.882.976
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3.434.700</b>	<b>III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3.434.700</b>
	14. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	3 Orang	3.434.700	14. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	3 Orang	3.434.700
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang</b>	<b>100%</b>	<b>7.628.240</b>	<b>IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan , Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang</b>	<b>100%</b>	<b>7.628.240</b>

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp )	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Tepat Waktu (%)</b>					<b>Tepat Waktu (%)</b>		
	15. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 Buku	5.306.612	15. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 Buku	5.306.612
	16. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	1.398.839	16. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	1.398.839
	17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	922.789	17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	922.789
<b>V</b>	<b>Program Perluasan dan Penempatan Kerja</b>		<b>Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)</b>	<b>100%</b>	<b>268.831.500</b>	<b>V. Program Perluasan dan Penempatan Kerja</b>		<b>Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)</b>	<b>100%</b>	<b>268.831.500</b>

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp )	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Salah satu Hotel di Kabupaten Malang	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	100%	268.831.500	18. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Salah satu Hotel di Kabupaten Malang	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	100%	268.831.500
	19. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Stadion Kanjuruhan dan SMK-SMK di Kabupaten Malang	Persentase terlaksananya kegiatan penyebaran informasi bursa tenaga kerja bagi masyarakat	0%	-	19. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Stadion Kanjuruhan dan SMK-SMK di Kabupaten Malang	Persentase terlaksananya kegiatan penyebaran informasi bursa tenaga kerja bagi masyarakat	0%	-
	20. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentas Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	0 Orang	-	20. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentas Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	0 Orang	-

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp )	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>VI.</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>		<b>Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>3.083.166.000</b>	<b>VI. Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>		<b>Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>3.083.166.000</b>
	21. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi *)	Kec. Singosari, Jabung dan Pagelaran	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	264 Orang	1.070.000.000	21. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Kec. Singosari, Jabung dan Pagelaran	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	264 Orang	1.070.000.000
	22. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Stadion Kanjuruhan dan SMK-SMK di Kab. Malang	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	500 Orang	308.208.000	22. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Stadion Kanjuruhan dan SMK-SMK di Kab. Malang	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	500 Orang	308.208.000
	23. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja	Kecamatan di Kabupaten Malang	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan	340 Orang	1.704.958.000	23. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Kecamatan di Kabupaten Malang	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan	340 Orang	1.704.958.000

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp )	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan Masyarakat *)		dan keterampilan kerja					dan keterampilan kerja		
<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja</b>		<b>Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.137.003.800</b>	<b>VII. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja</b>		<b>Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.137.003.800</b>
	24. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kecamatan Singosari, Lawang, Kapanjen, Wagir, Salah satu hotel di Kabupaten Malang	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	1 Rekom	887.024.800	24. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kecamatan Singosari, Lawang, Kapanjen, Wagir, Salah satu hotel di Kabupaten Malang	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	1 Rekom	887.024.800
	25. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kecamatan Singosari, Lawang, Kapanjen, Wagir, Salah satu hotel di Kabupaten Malang	Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	249.979.000	25. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kecamatan Singosari, Lawang, Kapanjen, Wagir, Salah satu hotel di Kabupaten Malang	Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	249.979.000

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp )	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>		<b>Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)</b>	<b>100%</b>	<b>734.594.000</b>	<b>VIII. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>		<b>Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)</b>	<b>100%</b>	<b>734.594.000</b>
	26. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	BLKI Singosari, Kecamatan Pujon & Sumbermanjing Wetan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	0 Orang	-	26. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	BLKI Singosari, Kecamatan Pujon & Sumbermanjing Wetan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	0 Orang	-
	27. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri	BLKI Singosari, salah satu hotel di Kabupaten Malang	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	40 Lembaga	101.096.000	27. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri	BLKI Singosari, salah satu hotel di Kabupaten Malang	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	40 Lembaga	101.096.000
	28. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	BLKI Singosari, Kecamatan Pujon & Sumbermanjing Wetan	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	240 Orang	633.498.000	28. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	BLKI Singosari, Kecamatan Pujon & Sumbermanjing Wetan	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari	240 Orang	633.498.000

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp )	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								kerja		
<b>IX</b>	<b>Program Ketransmigrasi an</b>		<b>Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi</b>	<b>100%</b>	<b>586.831.000</b>	<b>IX. Program Ketransmigrasi an</b>		<b>Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi</b>	<b>100%</b>	<b>586.831.000</b>
	29. Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan	Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dengan Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	3 Lokasi	142.716.000	29. Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan	Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	Jumlah lokasi terlaksananya a koordinasi dengan Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	3 Lokasi	142.716.000
	30. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Pemda Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	5 KK	196.282.000	30. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Pemda Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	5 KK	196.282.000

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp )	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	31. Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Kecamatan Pojun, Sumbermanjing Wetan	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	560 Orang	137.674.000	31. Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Kecamatan Pojun, Sumbermanjing Wetan	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	560 Orang	137.674.000
	32. Pelatihan Transmigrasi Lokal	Kecamatan Pojun, Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	15 Orang	110.159.000	32. Pelatihan Transmigrasi Lokal	Kecamatan Pojun, Kecamatan Sumbermanjing Wetan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	15 Orang	110.159.000
	<b>TOTAL</b>				<b>6.862.048.893</b>	<b>TOTAL</b>				<b>6.862.048.893</b>

#### Keterangan

- Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi akan diadakan perubahan nama kegiatan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil yaitu menjadi Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat akan diadakan perubahan nama kegiatan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil yaitu menjadi Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019.

**Tabel 2.5**

### Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2019

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		<b>NIHIL</b>			

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada Tahun 2019 terdapat sebanyak 9 (sembilan) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019 ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Demikian untuk dilaksanakan.

**WAKIL BUPATI MALANG,**



**SANUSI**